

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal Peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

6.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara diatas tentang Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bahwa dalam :

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran Unit Layanan Pengadaan barang/jasa dalam mengkaji Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, penulis dapat menganalisa bahwa peran ULP dalam mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sudah transparan dan akuntabel, dengan memberikan informasi tentang hasil pengkajian RUP kepada masyarakat umum dengan melalui berbagai media, media cetak, papan pengumuman pemerintah dalam hal ini di SKPD masing-masing, portal pengadaan nasional melalui LPSE, dengan maksud mencapai tujuan untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah yaitu masyarakat secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum dan khususnya Pihak ketiga. Hasil dari pengkajian ini pun tentunya sudah akuntabel karena telah melalui prosedur yang telah diatur dalam Perpres, Peraturan Bupati dan Undang-undang yang berlaku. Namun dalam proses pengkajian Anggota Pokja ULP tidak melakukan ini, menurut Anggota ULP biasanya SKPD melakukan Pengkajian RUP sendiri karena SKPD merasa lebih mengetahui spesifikasi barang atau jasa yang akan di lelangkan. Dalam hal ini berarti Anggota Pokja tidak melakukan perannya dengan baik dikarenakan kurangnya pengalaman dan kompetensi anggota Pokja dalam mengkaji Rencana Umum Pengadaan.

- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Peran LPSE dalam menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa, penulis dapat simpulkan bahwa penyusunan rencana penyedia barang/jasa sudah transparan dengan diumumkan kepada masyarakat umum dan sebelum diumumkan dikoordinasikan dengan Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja terlebih dahulu untuk memastikan metode dan mekanisme pemilihan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa:

mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional. Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai sosialisasi program, penulis dapat simpulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional sudah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dilihat dan diakses oleh semua masyarakat dan pihak peminat pengadaan barang/jasa;

- d. menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran LPSE dalam menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis dapat simpulkan bahwa sudah terbuka dan akuntabel dapat dilihat dari informasi yang diperoleh oleh pihak ketiga yang mengikuti kualifikasi bisa dengan mudah dalam mengakses dan melihat hasil penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa. Tetapi dalam proses penilaiannya bersifat tertutup karena merupakan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2012, tapi dalam pelaksanaannya, Anggota Pokja ULP terkadang tidak melakukan proses itu karena harus membutuhkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang tidak ditunjang oleh LPSE.

- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran LPSE dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran yang masuk, penulis dapat simpulkan bahwa dalam proses evaluasi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan aturan, kelompok kerja tidak menampilkan pada pengumuman namun setelah memperoleh hasil dari evaluasi tersebut kelompok kerja. LPSE mengumumkan kepada masyarakat umum melalui Portal pengadaan barang dan jasa melalui LPSE akan tetapi terkadang anggota Pokja LPSE sering tidak teliti dalam melakukan evaluasi, setelah diambil keputusan ternyata hasilnya tidak sesuai ini dikarenakan Anggota Pokja tidak dapat bekerja secara maksimal karena Anggota Pokja masih memiliki tanggungjawab di SKPD asal akibatnya Anggota Pokja tidak fokus dalam bekerja.

f. menjawab sanggahan;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai apakah dalam menjawab sanggahan ULP telah terbuka dan akuntabel, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjawab sanggahan Kelompok kerja LPSE tidak kesulitan untuk menjawab secara manual karena sudah tercatat dalam system (LPSE) sehingga keakuratan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Namun alangkah lebih baiknya Anggota ULP memiliki Kompetensi yang lebih dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar dapat mengatasi permasalahan yang selalu berkembang. dalam menjawab sanggahan diperlukan kecermatan dan keakuratan dengans semua bukti dan peraturan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih jauh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Peran Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penulis dapat simpulkan bahwa penyerahan salinan dokumen pemilihan penyedia mmbarang/jasa telah sesuai dengan aturan dan alur proses pengadaan karena untuk melaksanakan tahapan berikutnya dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Peran LPSE dalam penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa, bersifat tertutup dan rahasia, karena memang tidak untuk konsumsi publik, namun secara langsung dapat dipertanggungjawabkan.

- a. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Peran LPSE dalam mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penulis dapat simpulkan bahwa pada dasarnya sudah terbuka dan akuntabel karena setiap PPK menetapkan Harga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati sebagai acuan dan landasan hukumnya.

- b. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai Peran LPSE dalam Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati, penulis dapat simpulkan bahwa Unit Layanan Pengadaan selalu melaporkan kegiatan-kegiatan setiap bulannya secara terbuka Unit Layanan Pengadaan juga selalu membuat tembusan laporan kepada Inspektorat selaku pengawas internal.

- c. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran LPSE dalam membuat Laporan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, penulis dapat simpulkan bahwa Unit Layanan Pengadaan secara periodik maupun akhir tahun dan melaporkan hasilnya kepada pemilik kegiatan yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- d. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan Pengadaan, penulis dapat simpulkan bahwa dalam merancang strategi Unit Layanan Pengadaan melakukan koordinasi intern dengan para anggota Kelompok kerja yang nantinya menghasilkan pembuatan jadwal kegiatan dan rencana kegiatan, setelah diperoleh hasil yang pasti kemudian LPSE mengumumkannya melalui papan pengumuman resmi pemerintah dan portal pengadaan nasional, namun dalam penyusunan strategi ini banyak perbedaan pendapat dalam hal pengaturan waktu jadwal karena harus menentukan waktu diluar kesibukan masing-masing anggota LPSE sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam koordinasi dan penyampaian hasil keputusan;

- e. melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran LPSE dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE), dapat penulis simpulkan bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik sangat membantu dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.

- f. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran ULP dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk, penulis dapat simpulkan bahwa dalam proses evaluasi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan aturan, kelompok kerja tidak menampilkan pada pengumuman namun setelah memperoleh hasil dari evaluasi tersebut kelompok kerja LPSE mengumumkan kepada masyarakat umum melalui Portal pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, di tahap evaluasi ini biasanya masih terdapat kesalahan akibat tidak telitinya para Anggota Pokja bagian layanan pengadaan barang dan jasa karena Anggota Pokja harus berbagi Tanggung jawab dengan SKPD asal.

- g. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, dokumen survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia;

Dari beberapa wawancara dengan informan mengenai peran LPSE dalam mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, dokumen survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia, penulis dapat simpulkan bahwa semua proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan ULP sudah sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan dan SOP yang berlaku, Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang indikator dapat penulis simpulkan bahwa system informasi manajemen pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ULP sudah kompeten dalam bidangnya sehingga mampu untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa dengan baik.

1.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai analisis peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Menambah dan memperbanyak jumlah personil / Anggota ULP. Terutama bagian yang memiliki kewenangan dengan ULP untuk lebih sering mengadakan Ujian Sertifikasi.
2. Jumlah personil yang kurang dalam melakukan kegiatan menyebabkan pekerjaan dirangkap sehingga akan lebih baik ditambah jumlah personilnya sehingga pekerjaan dari mulai Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan bertambah.
3. Sering diadakannya bimbingan teknis, workshop, diskusi internal serta konsultasi kepada pembuat kebijakan menjadikan personil atau Anggota ULP menjadi lebih berkompeten, ataupun dengan menjadikan anggota ULP secara kontinue atau berkelanjutan agar dapat mengatasi permasalahan yang selalu berkembang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika sudah memiliki kompetensi yang merata diharapkan LPSE di Kabupaten Rokan Hilir dapat mengoptimalkan fungsi pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa atau menjadi pusat kajian, konsultasi dan mencari solusi masalah Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Lebih baik jika ULP tidak berstatus adhoc karena pengadaan adalah kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi sehingga diperlukan personil yang total bekerja dan hanya bekerja untuk Pengadaan Barang dan Jasa saja dan tidak terikat oleh tupoksi lain.
6. Adanya Perlindungan hukum yang jelas atau pendampingan hukum untuk lebih membuat para personil/anggota ULP lebih semangat dalam bekerja. Dalam hal ini juga dengan memberikan penghargaan yang seimbang dengan beban dan resiko yang dihadapi.